



# PEMERINTAH KOTA BIMA

PRIORITAS PLAFON  
ANGGARAN SEMENTARA

2024

TAHUN 2023

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....		i
Daftar Tabel .....		ii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Tujuan.....	2
	1.3 Dasar Hukum.....	2
BAB II	RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	6
	2.1 Target Pendapatan Daerah.....	7
	2.2 Rencana Penerimaan Daerah.....	7
BAB III	PRIORITAS BELANJA DAERAH.....	10
	3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Bima terhadap Prioritas Prioritas Pembangunan Nasional.....	10
	3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Prioritas pembangunan Provinsi .....	14
	3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah.....	19
	3.4 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan pemerintah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	
BAB IV	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN.....	42
	4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	42
	4.2 Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi hasil, bantuan keuangan, Belanja tidak Terduga.....	43
BAB V	RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH.....	44
	5.1 Plafon Anggaran Sementara untuk Pembiayaan.....	44
BAB VI	PENUTUP .....	45

## DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Target Pendapatan Daerah Tahun anggaran 2024
- Tabel 2.2 Rencana Penerimaan Daerah
- Tabel 3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Bima terhadap Prioritas Prioritas Pembangunan Nasional
- Tabel 3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Prioritas pembangunan Provinsi tahun 202
- Tabel 3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah
- Tabel 3.4 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan pemerintah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
- Tabel 4.2 Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi hasil, bantuan keuangan, Belanja tidak Terduga
- Tabel 5.1 Plafon Anggaran Sementara untuk Pembiayaan



**NOTA KESEPAKATAN**  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA BIMA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

NOMOR : 180/3/BA/VII/2023  
TANGGAL : 27 Juli 2023

TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MUHAMMAD LUTFI

Jabatan : Wali Kota Bima

Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 02 Raba Bima

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : ALFIAN INDRAWIRAWAN, S.Adm.

Jabatan : Ketua DPRD Kota Bima

Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 55 Raba Bima

b. Nama : SYAMSURIH, SH.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bima

Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 55 Raba Bima

c. Nama : Drs. H. MUSTAMIN

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bima

Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 55 Raba Bima

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Kota Bima, 27 Juli 2023

WALI KOTA BIMA

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BIMA

Selaku,  
PIHAK PERTAMA



MUHAMMAD LUTFI

Selaku,  
PIHAK KEDUA



ALFIAN INDRAWIRAWAN, S.Adm.  
KETUA

SYAMSURIH, SH.  
WAKIL KETUA

A blue ink handwritten signature.

Drs. H. MUSTAMIN  
WAKIL KETUA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyusunan dokumen APBD berpedoman pada dokumen KUA dan PPAS yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal tersebut sejalan dengan pasal 265 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa dalam penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Kepala Daerah berpedoman pada RKPD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 merupakan tahapan lanjutan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disusun dengan tahapan:

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
3. Menyusun capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Sebagai bagian dari dokumen penganggaran Tahun 2024, PPAS ini menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah, yang tidak terlepas dari prospek perekonomian Kota Bima ke depan. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam APBD, nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**

Tujuan disusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bima Tahun 2024 adalah untuk:

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Bima dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima tentang Prioritas Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam prioritas program tiap urusan serta Plafon Anggaran Sementara untuk masing-masing program/kegiatan;
2. Sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

## **1.3. Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Kota Bima Tahun 2024 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi NTB/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
  13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2023-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka



- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023;
  20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
  21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  22. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88);
  23. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
  24. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 103);
  25. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor

88);

26. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 215);
27. Peraturan Walikota Bima Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 257);

## **BAB II**

# **RENCANA PENERIMAAN DAERAH**

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (ii) Pendapatan Transfer dan (iii) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan Potensi Daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas Otonomi Daerah. Semakin tinggi kualitas Otonomi Daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mempertimbangkan terjadinya ketidakpastian kondisi global dan nasional yang diprediksi akan berdampak di tahun 2024 pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, maka komposisi APBD di tahun 2024 mengalami penyesuaian dari target semula sesuai dengan RPJMD tahun 2019 – 2024 dengan mempertimbangkan prediksi kondisi makro ekonomi secara Nasional, NTB serta Kota Bima tahun 2024.

Berikut adalah uraian tentang rincian pendapatan dan penerimaan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2024:

## **2.1. Target Pendapatan Daerah**

Struktur Pendapatan Daerah Kota Bima Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendapatan Daerah berdasarkan target Tahun 2022 sebesar Rp786.130.956.782,00,-, sedangkan target Tahun 2023 sebesar Rp782.938.149.798,00,-, pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp816.370.716.363,00,-.

## **2.2. Rencana Penerimaan Daerah**

Berikut dijabarkan komposisi Rencana Penerimaan Daerah yaitu dari Pendapatan Daerah tahun 2024 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2022 dan target tahun 2023.

### **2.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah Kota Bima berdasarkan realisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp57.359.469.008,22, target Tahun 2023 sebesar Rp62.776.690.694,00,-. Pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp57.022.653.756,00,-

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Pajak Daerah**

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Bima terdiri dari 9 jenis yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berdasarkan realisasi Pajak Daerah Tahun 2022 sebesar Rp21.355.298.265,81, target Tahun 2023 sebesar Rp24.939.277.198,-. Pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp24.542.688.185,-

#### **2. Retribusi Daerah**

Realisasi Retribusi Daerah pada Tahun 2022 sebesar Rp19.710.293.760,28, target Tahun 2023 sebesar Rp22.724.824.040,-. Pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp27.389.188.471,-.

### **3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2022 sebesar Rp1.545.139.285,-, target pada Tahun 2023 sebesar Rp1.284.388.412,-. Pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp1.284.388.412,-.

### **4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah**

Realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp16.138.801.485,-, target pada Tahun 2023 sebesar Rp13.828.201.044,-. Proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah pada Tahun 2024 sebesar Rp3.806.388.688,-.

## **2.2.2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer berdasarkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp748.451.787.052,-, target pada tahun 2023 sebesar Rp720.161.459.104,- Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp751.210.820.607,-. Adapun sumber-sumber dari pendapatan transfer meliputi:

### **1. Transfer Pemerintah Pusat**

Realisasi tahun 2022 sebesar Rp696.779.883.471,-, target pada Tahun 2023 sebesar Rp652.161.655.000,-. Pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp683.411.016.503,-

### **2. Transfer Antar Daerah**

Realisasi tahun 2022 sebesar Rp51.671.903.581,-, target pada Tahun 2023 sebesar Rp67.999.804.104,-. Pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp67.799.804.104,-.

## **2.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Pada tahun 2022 dan tahun 2023 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak ditargetkan. Pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp8.137.242.000,-.

Tabel 2.1  
RENCANA PENERIMAAN DAERAH  
**Tahun Anggaran 2024**

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	57.022.653.756,00	
4.1.01	Pajak Daerah	24.542.688.185,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	27.389.188.471,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.284.388.412,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.806.388.688,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	751.210.820.607,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	683.411.016.503,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.799.804.104,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.137.242.000,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.137.242.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	816.370.716.363,00	
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.000.000.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	836.370.716.363,00	

## **BAB III**

# **PRIORITAS BELANJA DAERAH**

1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Bima Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Tabel 3.1

### **Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Bima Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**





No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	322.412.300,00
			Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	972.016.902,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	3.478.180.400,00
			Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	41.311.000,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase kampung siaga bencana yang terbentuk	Dinas Sosial	139.882.500,00
3	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
			Persentase Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan Ideologi pancasila dan Karakter Bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	655.446.800,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			Persentase Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.379.236.300,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Kelompok Sasaran Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.221.184.600,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
			Persentase Kelompok Sasaran Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	151.937.200,00
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			Persentase Konflik Sosial yang tertangani		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.940.807.940,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.340.841.986,00
			undefined		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	362.527.600,00

**Tabel 3.2**  
**SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
140	Pembangunan Manusia (PD-2)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase PSKS yang diberdayakan	Dinas Sosial	20.000.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	0,00
			Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	5.000.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	19.000.000,00
			Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	5.000.000,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase kampung siaga bencana yang terbentuk	Dinas Sosial	4.750.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Ketahanan Pangan	20.278.200,00
			Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan		
				Dinas Ketahanan Pangan	20.278.200,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Persentase berkurangnya daerah rawan/ rentan pangan		
				Dinas Ketahanan Pangan	147.807.700,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Persentase Produk Pangan Segar Asat Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan		
				Dinas Ketahanan Pangan	41.133.700,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah		
				Dinas Ketahanan Pangan	576.000,00
143	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5)				
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Persentase Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter Bangsa		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	138.358.400,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			Persentase Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	116.444.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Kelompok Sasaran Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.221.184.600,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		
			Persentase Kelompok Sasaran Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	65.447.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
			Persentase Konflik Sosial yang tertangani		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	84.950.500,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.158.000,00
			undefined		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.971.600,00
			Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan		
				Bagian Umum	900.000,00
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
			Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan		
				Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	34.286.900,00
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
			Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
				Bagian Kesejahteraan Rakyat	157.833.800,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	73.706.250,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Bagian Administrasi Pembangunan	1.648.000,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pemerintahan	269.263.240,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	97.882.400,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Kecamatan	Kecamatan Asakota	1.052.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Cakupan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan	Kecamatan Asakota	18.129.600,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan	Kecamatan Asakota	46.790.800,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENVELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan		
				Kecamatan Asakota	2.904.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Persentase PD yang mengelola keuangan dengan baik		
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Persentase PD yang mengelola BMD dengan baik		
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.356.500,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Persentase Objek Pajak Daerah Yang dilakukan Pendataan dengan baik Tiap Tahunnya		
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.543.450,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran		
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.951.700,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Cakupan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan		
				Kelurahan Kolo	593.944.950,00

Tabel 3.3  
**PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS  
 DAERAH**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan stabilitas daerah dalam rangka pelaksanaan Pemilu Serentak 2024						
		---					
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				---			
					Satuan Polisi Pamong Praja	1.514.789.900,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
				---			
					Dinas Pertanian	275.298.100,00	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
					Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
					Sekretariat Daerah	950.479.190,00	
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
					Persentase Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter Bangsa		
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	655.446.800,00	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
					Persentase Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.379.236.300,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Persentase Kelompok Sasaran Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		1.221.184.600,00		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
				Persentase Kelompok Sasaran Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		151.937.200,00		
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
				Persentase Konflik Sosial yang tertangani:				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		2.940.807.940,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		3.340.841.986,00		
				undefined				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		362.527.600,00		
				--				
				Satuan Polisi Pamong Praja		7.675.351.597,00		
<b>2</b>	<b>Mitigasi Bencana</b>							
				--				
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				--				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1.514.801.000,00		
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				---				
					Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	863.725.900,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				---				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.223.172.886,00		
					Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.555.810.676,00		
3			<b>Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih</b>					
					---			
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
				---				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	351.380.450,00		
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
				---				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83.955.800,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
				---				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	94.604.300,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
				---				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.950.900,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				---				
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	382.753.000,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
				---				
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	345.748.000,00		
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
				---				
					Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	33.025.000,00		
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
				---				
					Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	230.000.000,00		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
				---				
					Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	33.915.000,00		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				---				
					Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	70.879.600,00		
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
				---				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35.023.200,00		
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				---			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	160.183.500,00	
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
				---			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	459.100.000,00	
					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		
				---			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	41.841.400,00	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		
				---			
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	203.811.000,00	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		
				---			
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	262.022.000,00	
					PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
				---			
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	625.731.700,00	
					PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		
				---			
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	139.621.600,00	
					PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				---				
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	11.160.438.000,00		
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
				---				
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.067.097.900,00		
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
				---				
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	496.540.279,00		
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
				---				
					Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	90.642.000,00		
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
				---				
					Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	330.750.000,00		
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				---				
					Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	176.076.000,00		
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				---				
					Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1.170.000.000,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				---				
					Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	44.076.000,00		
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
					Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			
					Sekretariat Daerah	959.190.000,00		
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
					Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan			
					Sekretariat Daerah	1.601.531.060,00		
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
					---			
					Sekretariat DPRD	7.127.545.500,00		
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
					---			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	667.645.000,00		
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
					---			
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.690.088.080,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
					Persentase PD yang mengelola keuangan dengan baik			
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.739.035.712,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Kecamatan					
				---				
					Kecamatan Asakota	39.631.300,00		
					Kecamatan Mpunda	65.800.000,00		
					Kecamatan Raba	38.166.000,00		
					Kecamatan RasanaE Barat	33.047.500,00		
					Kecamatan RasanaE Timur	46.520.000,00		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Cakupan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan					
					Kecamatan Asakota	3.230.074.900,00		
				---				
					Kecamatan Asakota	564.165.000,00		
					Kecamatan Mpunda	4.569.757.400,00		
					Kecamatan Raba	5.629.131.500,00		
					Kecamatan RasanaE Barat	3.445.931.500,00		
					Kecamatan RasanaE Timur	3.141.993.100,00		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan					
					Kecamatan Asakota	46.790.800,00		
				---				



No	Prioritas Prov/kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Kecamatan Mpunda	25.544.000,00		
					Kecamatan Raba	28.170.000,00		
					Kecamatan Rasanae Barat	66.819.000,00		
					Kecamatan Rasanae Timur	18.000.000,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan				
					Kecamatan Asakota	2.904.000,00		
				---				
					Kecamatan Mpunda	12.930.000,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENNIKOTA					
				Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan				
					Kecamatan Asakota	7.436.004.129,00		
				Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12.119.968.106,00		
				Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan				
					Sekretariat Daerah	25.983.353.823,00		
				---				
					Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.256.168.992,00		
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	201.041.600,00		
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.232.461.794,00		
					Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.307.492.600,00		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.636.519.627,00		
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	6.061.879.510,00		
					Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	6.792.241.693,00		
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.637.481.626,00		
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.788.500,00		
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.307.828.842,00		
					Inspektorat	7.802.507.488,00		
					Kecamatan Mpunda	11.277.195.376,00		
					Kecamatan Raba	12.822.236.364,00		
					Kecamatan RasanaE Barat	7.343.478.154,00		
					Kecamatan RasanaE Timur	8.690.721.039,00		
					Sekretariat DPRD	17.804.970.932,00		
<b>4</b>	<b>Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan</b>							
					—			
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
					---			
					Dinas Kesehatan	15.850.000,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
					---			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.922.204.610,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				--				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.267.403.802,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
				--				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.598.112.080,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
				--				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.834.819.686,00		
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				--				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	290.814.500,00		
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
				--				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	37.652.732.548,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				--				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.875.714.403,00		
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
				--				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	219.116.800,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				---				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	608.267.280,00		
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
				---				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	767.183.740,00		
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				---				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.664.305.000,00		
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
				---				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.106.687.300,00		
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					
				---				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.159.767.390,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					
				---				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	214.774.400,00		
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
				---				
					Dinas Lingkungan Hidup	193.499.600,00		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				---				
					Dinas Lingkungan Hidup	407.819.728,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
				---				
					Dinas Lingkungan Hidup	4.212.063.250,00		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
				---				
					Dinas Lingkungan Hidup	149.750.000,00		
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				---				
					Dinas Lingkungan Hidup	110.000.000,00		
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				---				
					Dinas Lingkungan Hidup	53.265.000,00		
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
				---				
					Dinas Lingkungan Hidup	35.920.000,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
				---				
					Dinas Lingkungan Hidup	5.414.232.936,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				---				
					Dinas Perhubungan	8.632.371.586,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
				---				
					Dinas Perhubungan	53.460.000,00		
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
					Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			
					Sekretariat Daerah	11.573.125.900,00		
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				---				
					Badan Riset dan Inovasi Daerah	86.810.000,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				---				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	160.810.000,00		
					Badan Riset dan Inovasi Daerah	126.644.000,00		
					Dinas Lingkungan Hidup	10.944.742.089,00		
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.746.490.663,00		
					Dinas Perhubungan	4.772.601.846,00		
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.063.646.330,00		
5	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan							



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	---			
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	901.400.000,00	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	---			
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.713.371.000,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	---			
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.166.797.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	---			
					Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.043.788.700,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAN	---			
					Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.298.912.881,00	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	---			
					Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	266.943.750,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	---			
					Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	222.857.500,00	



No	Prioritas Prov/kab/kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
				---				
					Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	13.582.700,00		
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				
				Sekretariat Daerah		157.833.800,00		
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				---				
					Badan Riset dan Inovasi Daerah	693.710.600,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				---				
					Dinas Kesehatan	70.852.053.837,00		
					Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	153.328.178.803,00		
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.489.790.264,00		
					Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	9.788.510.725,00		
6	Penurunan angka kemiskinan, Pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja							
				---				
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				Persentase PSKS yang diberdayakan				
				Dinas Sosial		96.450.000,00		
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial				
				Dinas Sosial		322.412.300,00		
				Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial				
				Dinas Sosial		972.016.902,00		
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial				
				Dinas Sosial		3.478.180.400,00		
				Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial				
				Dinas Sosial		41.311.000,00		
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				Persentase kampung siaga bencana yang terbentuk				
				Dinas Sosial		139.882.500,00		
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
				--				
				Dinas Tenaga Kerja		16.162.400,00		
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				--				
				Dinas Tenaga Kerja		506.470.000,00		
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				--				
				Dinas Tenaga Kerja		374.670.000,00		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	---			
				---			
				Dinas Tenaga Kerja		161.909.000,00	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	---			
				---			
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		2.051.289.550,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	---			
				---			
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		273.267.300,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	---			
				---			
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		99.393.200,00	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	---			
				---			
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		283.150.000,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	---			
				---			
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		652.624.500,00	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
				Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan			
				Dinas Ketahanan Pangan		807.804.500,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan			
					Dinas Ketahanan Pangan	807.804.500,00	
					PROGRAM PENANGANAN KERAWAMAN PANGAN		
				Persentase berkurangnya daerah rawan/ rentan pangan			
					Dinas Ketahanan Pangan	147.807.700,00	
					PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
				Persentase Produk Pangan Segar Asat Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan			
					Dinas Ketahanan Pangan	128.539.600,00	
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
					Dinas Kelautan dan Perikanan	219.198.200,00	
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
					Dinas Kelautan dan Perikanan	221.004.050,00	
					PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
					Dinas Kelautan dan Perikanan	1.322.604.528,00	
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
					Dinas Pertanian	2.471.976.999,00	
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				---				
					Dinas Pertanian	75.900.000,00		
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
				---				
					Dinas Pertanian	218.381.200,00		
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
				---				
					Dinas Pertanian	229.100.000,00		
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				---				
					Dinas Pertanian	325.646.045,00		
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
					Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan			
					Sekretariat Daerah	510.366.900,00		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				---				
					Badan Riset dan Inovasi Daerah	30.333.000,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah			
					Dinas Ketahanan Pangan	3.495.036.630,00		
					---			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.714.000,00		
					Badan Riset dan Inovasi Daerah	2.095.750.433,00		
					Dinas Kelautan dan Perikanan	3.684.594.500,00		
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.481.542.777,00		
					Dinas Pertanian	12.995.855.908,00		
					Dinas Sosial	4.603.808.721,00		
					Dinas Tenaga Kerja	3.897.313.337,00		

## **BAB IV**

# **PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan/sub kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

Tabel 4.1

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,  
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

2. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tabel 4.2.

Tabel 4.2

**Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa,  
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan  
Keuangan, Belanja Tidak Terduga  
Tahun Anggaran 2024**

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
1	BELANJA OPERASI	710.793.462.393,00
	Belanja Pegawai	402.989.048.107,00
	Belanja Barang dan Jasa	262.747.329.769,00
	Belanja Bunga	0,00
	Belanja Subsidi	0,00
	Belanja Hibah	37.881.084.517,00
	Belanja Bantuan Sosial	7.176.000.000,00
2	BELANJA MODAL	120.577.253.970,00
	Belanja Modal Tanah	3.217.420.790,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.555.655.381,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.503.306.331,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.229.181.468,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	71.690.000,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
4	BELANJA TRANSFER	
	Belanja Bagi Hasil	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00



# BAB V

## RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan daerah menempati posisi yang sangat strategis sebagai transaksi untuk mencapai keseimbangan anggaran dengan tetap memperhatikan misi untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah timbul karena jumlah belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah, sehingga menimbulkan defisit. APBD pada Tahun 2024 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp18.000.000.000,-. Upaya untuk menutup defisit anggaran tersebut, diutamakan berasal dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang tidak akan menjadi beban bagi Daerah di masa mendatang yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya pada tahun 2024, diproyeksikan sebesar Rp20.000.000.000,-. Di samping penerimaan pembiayaan, terdapat pula pengeluaran Pembiayaan Daerah, yang pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp2.000.000.000,-. Pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut digunakan untuk Penyertaan Modal (investasi) Daerah kepada Perusahaan Daerah. Target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah terdapat pada tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1  
**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN**  
Tahun Anggaran 2024

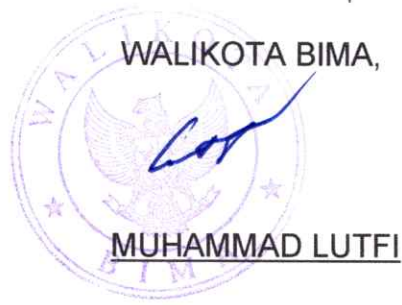
NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	DASAR HUKUM
6	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.000.000.000,00	
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>18.000.000.000,00</b>	

# BAB VI

## PENUTUP

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bima Tahun Anggaran 2024 disusun untuk dapat disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2024. Dengan harapan dapat mencapai sasaran pembangunan secara efektif dan efisien, sehingga selama kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang program/kegiatan yang dijalankan dapat memenuhi target-target pembangunan yang telah ditetapkan dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bima.

Kota Bima, 27 Juli 2023



SYAMSURIH, SH  
WAKIL KETUA

Drs. H. MUSTAMIN  
WAKIL KETUA